

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belanda yang bersikap semaunya atas kedaulatan negara Republik Indonesia, melakukan sebuah gerakan yang bernama “gerakan pembersihan” yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pihak Republik yang tidak terima atas tindakan Belanda tersebut, membawa Belanda ke meja perundingan. Sebuah pertemuan yang diadakan di atas kapal milik Amerika “Renville” pada tanggal 8 Desember 1947, mempertemukan delegasi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak.¹

Pertemuan tersebut membuahkan sebuah naskah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Renville. Isi perjanjian tersebut dinilai merugikan pihak Indonesia, namun Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri saat itu tidak serta merta langsung menandatangani perjanjian tersebut. Beliau sempat mendatangi Hatta, Syahrir dan Haji Agus Salim untuk membicarakan naskah perjanjian tersebut, dalam diskusi tersebut terjadi perbedaan pendapat yang membuat naskah tersebut awalnya tidak bisa untuk ditanda tangani, namun pada akhirnya naskah tersebut disetujui juga.²

¹ Fatimah Enar, dkk., *Sumatera Barat 1945-1949*, (Padang: Pemerintahan Daerah Sumatera Barat, 1978), hlm.185.

² *Ibid*, hlm.187.

Akibat gagalnya prakarsa perundingan Renville, Belanda sekali lagi mengambil tindakan kekerasan yang dinamai dengan Agresi Militer II, dengan tujuan menyingkirkan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta dengan cara melakukan serangan kedaerah-daerah sentral Republik Indonesia.³ Penyerangan serentak dilancarkan di tiga wilayah yang berbeda yaitu Yogyakarta, Bukittinggi dan Lubuk Linggau.

Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibu Kota Negara menjadi sasaran utama dari agresi Belanda, penyerangan ke Yogyakarta bertujuan untuk menangkap para pimpinan Republik Indonesia, selain itu penyerangan ke Bukittinggi bertujuan untuk melumpuhkan benteng pertahanan kedua Republik dan serangan ke Lubuk Linggau dilakukan Belanda karena daerah tersebut merupakan salah satu lintasan jaringan perdagangan terpenting dalam komoditas pertanian dan minyak di Sumatra.⁴

Penangkapan atas Soekarno, Hatta dan anggota kabinet Hatta, membuat tampuk kepemimpinan Republik menjadi kosong, sebelum ditangkapnya para pemimpin Republik di Yogyakarta, dua buah radiogram sempat dikirimkan kepada anggota kabinet Hatta yang sedang berada di luar Yogyakarta. Radiogram pertama dikirimkan kepada Sjafruddin Prawiranegara yang berisikan pemberian kekuasaan sepenuhnya untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatra dan radiogram kedua dikirimkan kepada A.A Maramis, Palar dan Soedarsono untuk mendirikan

³ Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 72.

⁴ *Ibid*, hlm. 74.

pemerintahan pelarian (Exile Government) jika Sjafruddin Prawiranegara gagal menjalankan mandatnya.⁵

Mandat yang dikirimkan kepada Sjafruddin Prawiranegara tidak pernah sampai ke tangannya beliau karena Belanda telah memutus jaringan komunikasi antara Yogyakarta dengan Bukittinggi. Tidak adanya kejelasan tentang kondisi pemerintah pusat di Yogyakarta memunculkan inisiatif Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan sebuah pemerintahan darurat yang bersifat mobile. Pada sebuah pertemuan yang dilakukan di rumah T.M Hasan di Ngarai Sianok, muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah pemerintahan darurat dari Kapten Islam Salim (ajudan Kolonel Hidayat) dan didorong oleh Kolonel Hidayat sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan pemerintahan darurat dengan Ketuanya Sjafruddin Prawiranegara dan T.M Hasan sebagai Wakilnya.⁶

Kondisi Bukittinggi yang semakin terpojok akibat serangan pasukan Belanda membuat para pimpinan yang sedang berada di kota itu memutuskan untuk mengungsi keluar daerah, tujuan pertama dari pengungsian adalah menuju ke Halaban. Setelah semua tokoh militer dan sipil sampai di Halaban, sebuah rapat dilakukan untuk melengkapi susunan kabinet PDRI.⁷

Setelah lengkapnya susunan Kabinet PDRI perjalanan dan perang gerilya pun dimulai, kabinet PDRI yang terbagi atas dua rombongan dengan menempati dua lokasi yang berbeda. Rombongan pertama dipimpin Sjafruddin Prawiranegara

⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁶ *Ibid*, hlm. 97.

⁷ Fatimah Enar, dkk., *op.cit*, hlm. 210.

mengambil lokasi persembunyiannya di daerah Bidar Alam, dan rombongan kedua yang dipimpin oleh St. Moh Rasjid bertempat di Koto Tinggi.⁸ Perjuangan yang dilakukan oleh PDRI dan masyarakat untuk mempertahankan Republik Indonesia dari Belanda merupakan sebuah perjuangan yang sangat menentukan kedudukan Republik Indonesia di mata internasional.

Perjalanan Rombongan yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara menyinggahi beberapa daerah dan menjadikan daerah tersebut sebagai pusat PDRI sementara, daerah terlama yang pernah disinggahi Sjafruddin Prawiranegara adalah Bidar Alam selama 95 hari yaitu dari tanggal 14 Januari sampai 18 April, kemudian Sumpur Kudus 60 hari, terdiri dari 13 hari di Calau/Sumpur Kudus dari tanggal 22 April sampai 4 Mei dan 47 hari di Silantai/Sumpur Kudus dari tanggal 4 Mei sampai 19 Juni, sedangkan pos komando PDRI di Koto Tinggi berlangsung selama 22 hari yaitu dari 19 Juni sampai 10 Juli.⁹

Menjelang akhir masa perjalanan gerilya PDRI, sebuah pertemuan terjadi antara tokoh-tokoh pejuang PDRI yang diadakan di Sumpur Kudus, pertemuan tersebut bertujuan untuk konsolidasi suara para pejuang PDRI mengingat langkah diplomatik yang ditempuh oleh Soekarno-Hatta. Kedatangan Sjafruddin Prawiranegara ke Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 1949 menjadi akhir dari perjalanan PDRI, Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya dalam sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Hatta.¹⁰

⁸ Mestika Zed, *op.cit*, hlm. 115.

⁹ Nopriyasman, "Penyelamat Republik: Pancaran Pesan Sejarah Perjuangan PDRI Untuk Keutuhan Bangsa, *Jurnal Analisis Sejarah*, Vol. V No.1, 2014, hlm. 19.

¹⁰ Mestika Zed, *op.cit*, hlm. 272-288.

Terbebasnya Republik Indonesia dari Belanda, telah mewujudkan satu cita-cita bangsa yaitu menjadi negara merdeka. Setelah diraihny kemerdekaan sepenuhnya, maka pemerintah Republik Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Banyaknya pertempuran dan perjuangan yang telah dilalui oleh pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh besar beserta rakyat Indonesia, agar tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Kisah-kisah perjuangan tersebut selayaknya dituliskan agar dapat menjadi bukti perjuangan yang telah dilakukan serta menjadi sejarah perjuangan bangsa. Penulisan kisah tersebut bertujuan agar terciptanya rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat Indonesia.

Corak penulisan sejarah di Indonesia pada periode revolusi berfokus pada tingkat daerah (Kota atau Provinsi), hal ini merupakan sebuah kecenderungan penulisan sejarah yang terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu gagasan untuk menulis sejarah nasional belum ada, akibatnya sejarah PDRI pada masa itu belum menjadi persoalan nasional.¹¹

Memasuki era Orde Baru, kuatnya posisi militer dalam penulisan sejarah memunculkan kecenderungan penulisan sejarah Indonesia yang menitik beratkan sejarah dari perspektif militer dengan menjadikan militer sebagai aktor utamanya, akibatnya muncul istilah “militersentris” dalam kepenulisan sejarah di Indonesia.¹² Kisah PDRI tidak semata-mata hilang begitu saja, namun kisah perjuangan PDRI

¹¹ Gusti Asnan, “PDRI Dalam Penulisan Sejarah Indonesia”, *Makalah Seminar Nasional PDRI*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2006), hlm. 3.

¹² *Ibid.*

yang dituliskan dalam buku terbitan masa pemerintahan Orde Baru lebih banyak menceritakan kisah perjuangan dari perspektif militer, akibat dari kecenderungan ini sejarah PDRI tidak tertulis dengan lengkap.¹³ Selain itu pergolakan yang terjadi di Sumatra Barat yang dikenal dengan PRRI, juga memberikan dampak kepada keberlangsungan kisah PDRI.

PDRI tenggelam dalam arus pergolakan PRRI, pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai sebuah gerakan separatis yang akan mengancam rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat Indonesia, sehingga kelompok PRRI harus diberantas. Pemerintah pusat yang telah mencoba langkah diplomasi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang berkejolak di Sumatra Barat, namun langkah tersebut ditolak, karena PRRI telah menyatakan bahwa PRRI tidak menerima kompromi, akibatnya pemerintah pusat memutuskan untuk memilih jalan militer dengan menggunakan persenjataan militer.

Cara penyelesaian masalah antara Pemerintah Pusat dengan kelompok PRRI yang menggunakan jalan militer, memberikan dampak buruk kepada mentalitas masyarakat Minangkabau.¹⁴ Beban mental yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat Minangkabau pasca PRRI seperti pembatasan-pembatasan kepada tokoh PRRI dan masyarakat Minangkabau membuat persoalan PDRI semakin tidak terfikirkan lagi oleh masyarakat tempat berlangsungnya kisah PDRI bahkan masyarakat Minangkabau.

¹³ Ayu Rulyani, "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat: Suatu Tinjauan Historiografi", *Jurnal*, (Padang: STKIP PGRI, 2016), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

Kisah PDRI yang terselimuti kabut sejak tahun 1950-an sampai 1970-an perlahan-lahan mulai terang dengan mulai munculnya tulisan-tulisan mengenai PDRI yang terbit pada surat kabar bahkan dituliskan kedalam buku. Salah satunya tulisan Moh. Rasjid selaku mantan Gubernur Militer Sumatra Barat yang berjudul *Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)* serta buku V. Sradjono dan G.L. Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI): Penyelamat Bangsa Indonesia*,¹⁵ menjadi pemantik naiknya isu tentang PDRI di Sumatra Barat bahkan pada tingkat nasional.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap perjuangan PDRI yang berperan sangat vital dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di mata internasional seperti, menuliskan sejarah PDRI secara lengkap, mengadakan seminar tentang PDRI, dan kegiatan Napak Tilas PDRI. Selain untuk mendapatkan pengakuan terhadap PDRI upaya tersebut juga bertujuan untuk menempatkan kisah PDRI ditempat yang semestinya dalam sejarah Indonesia.

Penulisan ini memfokuskan kajian pada usaha membentuk kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI yang dilakukan di Sumatra Barat pada tahun 2001 yang dipelopori oleh sebuah LSM yang bernama Persatuan Keluarga Besar Dewan Bateng (PKBDB). Berawal dari persiapan yang ditempuh oleh PKBDB agar dapat mengadakan sebuah kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI (NTN-PDRI) sampai

¹⁵ Gusti Asnan, *op.cit*, hlm. 8.

diakuinya hari lahir PDRI menjadi hari besar nasional yang kemudian dikenal dengan “Hari Bela Negara”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang salah satu rangkaian kegiatan dalam usaha untuk mendapatkan pengakuan terhadap PDRI secara nasional, kegiatan tersebut bernama Napak Tilak Nasional PDRI yang diadakan Sumatra Barat tahun 2001, maka dari itu penulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana usaha dan upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan kegiatan NTN PDRI, Tulisan ini berjudul **“PDRI dan Hari Bela Negara: Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatra Barat Tahun 2001”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian pada sebuah kegiatan yang bernama Napak Tilas Nasional PDRI yang diadakan Sumatra Barat pada tahun 2001. Batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu batasan spasial dan batasan temporal, agar lebih menjurus kepada pokok permasalahan penelitian. Batasan spasial dari tulisan ini adalah Provinsi Sumatera Barat karena kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI dilakukan di Provinsi Sumatra Barat dan Jambi, daerah Sumatra Barat yang menjadi tempat diadakannya kegiatan adalah kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan daerah Provinsi Jambi yaitu di Kabupaten Muara Tebo dan Muaro Bungo.

Batasan temporal dalam penelitian ini tahun 2000 sampai 2001. Tahun 2000 merupakan batasan awal dari penelitian ini, karena di tahun ini Panitia Pelaksana Daerah Napak Tilas Nasional PDRI dibentuk dan berpusat di Bukittinggi. Tahun 2001 menjadi batasan akhir dari penelitian ini, karena pelaksanaan kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatera Barat.

Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok masalah yang akan diteliti maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi inti permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi tenggelamnya Sejarah PDRI?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk menghadirkan sejarah PDRI?
3. Bagaimana proses pembentukan dan pelaksanaan kegiatan NTN PDRI di Sumatra Barat tahun 2001?
4. Dampak seperti apa yang muncul akibat dari diadakannya kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatra Barat tahun 2001?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dari tenggelamnya Sejarah PDRI
2. Menjelaskan usaha yang dilakukan untuk menghadirkan sejarah PDRI
3. Menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan pelaksanaan kegiatan NTN PDRI di Sumatra Barat tahun 2001

4. Menjelaskan Dampak yang muncul dari diadakannya kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatera Barat tahun 2001

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya bidang pada sejarah, sehingga bisa menambah pengetahuan pembaca mengenai peristiwa PDRI dan kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI yang diadakan di Sumatera Barat tahun 2001. Semoga tulisan ini dapat menjadi sebuah referensi penulisan dan berguna untuk peneliti selanjutnya. Penulisan ini jauh dari kata sempurna, tulisan ini menjadi salah satu wadah belajar membuat sebuah karya sejarah bagi penulis, maka dari itu saran dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan untuk memperbagus tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan hasil-hasil riset atau penelitian sebelumnya yang telah lebih dahulu mengkaji tentang PDRI dan memiliki hubungan dengan topik penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi yang dapat membantu dalam melakukan perbandingan bahwasannya penelitian ini memiliki sifat kebaruaran dan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta mendapatkan data-data yang mampu memperkuat analisis dalam penulisan ini nantinya.

Dalam tinjauan pustaka, ada beberapa referensi yang menjadi studi relevansi salah satunya yang menjadi acuan awal dari terciptanya tulisan ini, diantaranya

karya Wahyudi Djaja yang berjudul *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*.¹⁶ Buku itu menjelaskan arti penting PDRI dalam sejarah Indonesia dengan menjelaskan kisah-kisah PDRI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dan sedikit membahas tentang Hari Bela Negara, namun dalam buku ini tidak ada penjelasan mengenai ide-ide dan usaha yang dilakukan untuk dijadikannya tanggal lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara.

Buku yang diterbitkan KASBANGPOL Provinsi Banten dengan Judul *Bela Negara*.¹⁷ Menjelaskan tentang sejarah lahirnya Hari Bela Negara, tentang kepemimpinan dalam membela negara, pada buku ini hanya menjelaskan sejarah lahirnya Hari Bela Negara yang dipelopori oleh simpatisan PDRI di Bukittinggi. Buku ini belum menjelaskan bagaimana prosesi sampai dijadikannya tanggal 19 Desember bisa ditetapkan menjadi Hari Bela Negara.

Tinjauan selanjutnya yaitu Skripsi Ayu Rulyani yang berjudul “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat: Suatu Tinjauan Historiografi”.¹⁸ Skripsi ini bercerita tentang ketidakadilan pemerintah terhadap sejarah PDRI yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga memasuki era reformasi dilakukan penulisan ulang mengenai sejarah PDRI. pembahasan dalam skripsi ini menjadi dasar dalam penulisan tentang penyebab hilangnya peran PDRI dalam Sejarah Indonesia.

¹⁶ Wahyudi Djaja, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).

¹⁷ *Bela Negara*, (Banten: KASBANGPOL, 2020).

¹⁸ Ayu Rulyani, “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat: Suatu Tinjauan Historiografi”, *Skripsi*, (Padang: STKIP PGRI, 2016).

Selanjutnya Skripsi dari Rio Yenvan Permana yang berjudul “Pemerintahan Darurat Perublik Indonesia (PDRI) Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949”.¹⁹ Tulisan ini membahas PDRI dalam perspektif politik yang menceritakan strategi perjuangan PDRI pada masa kritis dalam mempertahankan Republik Indonesia. Berbeda dengan karya-karya terdahulu, maka tulisan ini membicarakan tentang kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI dimana kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian dari banyaknya kegiatan seputar PDRI sampai ditetapkannya hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara pada tahun 2006.

E. Kerangka Analisis

Langkah yang sangat penting dalam membuat karya sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikian atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan pendekatan yang akan dipakai dalam membuat sebuah analisis. Tulisan ini diberi judul “PDRI dan Hari Bela Negara: NTN PDRI di Sumatra Barat Tahun 2001”, merupakan kajian tentang sejarah politik, karena kajian ini membahas tentang usaha untuk mendapatkan pengakuan terhadap PDRI secara nasional. Proses panjang yang dilalui untuk mendapatkan pengakuan terhadap PDRI memiliki banyak rangkaian acara atau kegiatan salah satunya yaitu

¹⁹ Rio Yenvan Permana, “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2013).

kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI, kegiatan tersebut menjadi jalan pembuka untuk penetapan hari lahir PDRI sebagai hari besar nasional.

Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi, bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita yang memuat fakta-fakta untuk menggambarkan suatu peristiwa pada masa lampau, dan sejarah dalam arti objektif merujuk kepada kejadian atau peristiwa yang tidak akan terulang lagi.²⁰ Terdapat dua klasifikasi sejarah yang saling berkaitan satu sama lain yaitu sejarah lokal dan sejarah nasional.

Sejarah Lokal adalah suatu kajian sejarah yang berisi tentang penceritaan kejadian-kejadian yang bersifat lokal. Lokal di sini dimaksud sebagai suatu wilayah kecil tertentu yang pembatasannya biasanya dengan wilayah teritorial, keseragaman budaya, yang terkadang tidak secara jelas dan berhimpit.²¹ Berdasarkan definisi sejarah lokal sejarah PDRI merupakan sebuah sejarah lokal yang terjadi di Sumatra Tengah dan Jawa Tengah.

Sejarah nasional adalah yang kajian sejarahnya menyoroti kejadian yang bersifat nasional. Secara ideologis sejarah nasional hadir sebagai kepentingan negara dalam tujuannya yang berorientasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.²² Kehadiran PDRI yang lahir akibat kondisi pemerintahan nasional yang sedang dalam masa kritis akibat terjadinya agresi militer Belanda II yang menjadi penyambung tampuk kepemimpinan pemerintah pusat untuk mengamankan negara

²⁰ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosiasl Dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm 14-15.

²¹ Toto Sujatmiko, "Menjalin Silaturahmi Antara Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional", *Jurnal Seuneubok Lada*, No.1 Vol.2 Juli-Desember 2014, hlm. 108.

²² *Ibid*, hlm. 109.

Indonesia dari tangan Kolonialisme Belanda, maka dari itu sejarah PDRI merupakan sebuah sejarah nasional, karena PDRI merupakan sebuah chapter perjuangan yang menjadi penyelamat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie dalam buku Ilmu Politik mengungkapkan bahwa Ilmu Politik adalah sekelompok pengetahuan terapan yang membahas gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan.²³

Secara umum, Sejarah politik berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Menurut Hegel, Sejarah Politik adalah gagasan tentang negara dengan kekuatan moral dan spiritual di luar kepentingan materi dan pelajaran, diikuti bahwa negara merupakan agen utama dalam perubahan sejarah.²⁴

Kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. M. Solly Lubis mengatakan bahwa wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran atau pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan.²⁵ Maka dari itu dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya Presiden menetapkan bahwa tanggal 19 Desember

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1990), hlm. 45.

²⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 165.

²⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 40.

menjadi Hari Bela Negara, melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Bela Negara memiliki dua uraian yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik Bela Negara yaitu cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, dan secara non-fisik Bela Negara berarti segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.²⁶

Hari Bela Negara adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat pada 19 Desember 1948, Hari Bela Negara ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong semangat masyarakat untuk bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.²⁷

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah suatu badan pemerintahan yang dibentuk dalam kondisi darurat pada saat berlangsungnya Agresi Militer Belanda II, PDRI merupakan suatu pemerintahan yang bersifat mobile atau pusat pemerintahannya terus berpindah-pindah mencari lokasi yang aman dari musuh, PDRI diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara, masa gerilya PDRI dimulai sejak 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.²⁸

²⁶ I Gusti Bagus Wirya Agung, "Pendidikan Kewarganegaraan Bela Negara", *Makalah* (Bali: UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Universitas Udayana, 2016), hlm. 5.

²⁷ Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara.

²⁸ Mestika Zed, *op.cit*, hlm. 105.

Napak Tilas adalah kegiatan berjalan kaki dengan menelusuri jalan yang pernah dilewati oleh seseorang, pasukan, kelompok, dan sebagainya dengan tujuan untuk mengenang perjalanan pada masa perang atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada masa lalu.²⁹ Mengacu pada definisi dari Napak Tilas, bentuk kegiatan dari NTN PDRI di Sumatra Barat tahun 2001 yaitu perjalanan mengunjungi daerah-daerah persinggahan rombongan PDRI semasa gerilyanya yang mana daerah persinggahan tersebut ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dari PDRI saat itu.

Dalam sebuah kegiatan terdapat unsur-unsur penting dalam usaha membentuk kegiatan tersebut seperti, panitia dan peserta, menurut KBBI panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya yang tergabung kedalam kepanitiaan, kepanitiaan sendiri berarti organisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih. Peserta sendiri berarti orang yang ikut serta atau mengambil peran dalam suatu kegiatan.³⁰

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Sebagaimana kajian sejarah pada umumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lalu guna memperoleh

²⁹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/napak-tilas-pengertian-tujuan-dan-contohnya-1yebGergUHW>, di akses pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 14.56 WIB.

konstruksi aktifitas manusia tersebut pada masa lampau. Dalam metode sejarah ada empat langkah prosedur kerja, yaitu heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau tahap penulisan.

Tahap awal penelitian ini adalah pengumpulan beberapa sumber yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama yang akan digunakan dalam penulisan, jenis sumber primer yang ditemukan berupa arsip, dokumen, foto, laporan kegiatan NTN PDRI di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi rute perjalanan NTN PDRI, surat undangan kegiatan, dan daftar kepanitiaan NTN PDRI pada tingkat lokal Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Selain menggunakan sumber primer penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder sebagai sumber pendukung penelitian ini. Sumber pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal, dan koran. Tahap yang dilakukan dalam pengumpulan sumber ini yaitu dengan melakukan kunjungan dan mencari sumber ke Ruang Baca Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tahap kedua adalah kritik sumber, setiap data atau sumber yang telah didapatkan harus melalui tahap kritik. Tujuan dari kritik sumber adalah untuk mengidentifikasi tentang keaslian data atau sumber. Tahap kritik sumber terbagi dua yaitu kritik internal dan eksternal, kritik internal adalah tahap pengujian sumber berdasarkan kredibilitas isi sumber sejarah, dan kritik eksternal adalah tahap verifikasi atau pengujian sumber terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.

Selanjutnya yaitu tahap interpretasi atau penafsiran, interpretasi adalah penafsiran fakta-fakta yang telah didapatkan pada tahap kritik sumber lalu disusun ke dalam suatu pola yang benar berdasarkan sistematika yang telah disiapkan sebelumnya. Interpretasi bertujuan untuk mengelompokkan fakta-fakta yang telah didapatkan dan saling terkait satu sama lain, yang nantinya akan menciptakan fakta sejarah. Fakta sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung melalui dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum sejarah. Tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi, yaitu fakta yang telah diinterpretasikan atau ditafsirkan dipaparkan secara terstruktur menjadi satu kesatuan karya sejarah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tentang PDRI dan Hari Bela Negara: Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatera Barat tahun 2001, akan diuraikan dalam lima bab yaitu:

Bab I berupa pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Perjalanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan terbagi dalam beberapa sub bab, pertama

tentang latar belakang terbentuknya PDRI, kedua Pusat PDRI dan perang gerilya di Sumatera Barat, ketiga Pengembalian mandat ke Pemerintah pusat di Yogyakarta.

Bab III membahas tentang reformasi dan kebangkitan masyarakat yang terbagi atas dua sub bab yaitu, pertama tentang penyebab hilangnya peran PDRI dalam sejarah bangsa, kedua membahas tentang reformasi dan membangkitkan kembali peran PDRI dalam sejarah nasional Indonesia.

Bab IV membahas tentang kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI di Sumatera Barat yang terbagi juga atas tiga sub bab, pertama tentang ide dan persiapan NTN PDRI di Sumatera Barat, kedua tentang kegiatan NTN PDRI yang dilaksanakan di Sumatera Barat, ketiga tentang dampak NTN PDRI yang dilakukan di Sumatera Barat terhadap masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat.

Bab V merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan dari bab satu sampai bab akhir.

